

PERAN *PUBLIC RELATION* DALAM PROGRAM LARASITA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DI KELURAHAN KEFA TENGAH

Service Imelda Nubatonis

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan VI

Email : serviceimelda@rocketmail.com

Abstract:

Goal of the research to find out the role and planning models National Land Agency located in TTU regency (BPN TTU). This research as an evaluating BPN TTU activities in the management organization to goal the point of organization.

Research method is description cualitative with National Land Agency located in TTU regency by the subject research. The theories to analisist the research result are four role by Cutlip, Center & Broom and six models planing PR by Anggoro.

The result of research just find two role PR BPN apply those are expert prescriber and communication fasilitator. Before activites the project of Larasita BPN TTU apply also like Anggoro Theories.

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan model perencanaan *Public Relation* BPN Kabupaten TTU. Penelitian ini sebagai evaluasi kegiatan BPN Kabupaten TTU dalam manajemen organisasi demi tercapainya tujuan utama organisasi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskripsi kualitatif dengan subjek penelitian BPN Kabupaten TTU. Teori yang digunakan yaitu teori empat Peran PR Cutlip, Center & Broom dan enam langkah model perencanaan humas Anggoro.

Hasil penelitian dikaitkan dengan teori yang digunakan ditemukan bahwa hanya dua peran PR yang diterapkan di BPN Kabupaten TTU. Sebelum kegiatan dilakukan BPN Kabupaten TTU juga menerapkan perencanaan humas seperti yang dikemukakan Anggoro dalam teorinya guna tercapainya tujuan organisasi.

Kata kunci: Peran, model perencanaan, *Public Relation*, BPN

Pendahuluan

Komunikasi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia karena melalui komunikasi, manusia dapat mengetahui informasi yang diperlukan dari orang lain, menjadikan manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang akhirnya akan mengerti dan memahami pesan yang sudah tersampaikan agar menghasilkan *feedback*, yaitu adanya interaksi. Menurut Ruben & Stewart dalam Liliweri;

“komunikasi merupakan suatu yang sangat esensial bagi individu, relasi, kelompok, oragnisasi dan masyarakat, dia merupakan garis yang menghubungkan manusia dengan dunia, bagaimana manusia membuat kesan

tentang dan kepada dunia, komunikasi sebagai sarana manusia untuk mengekspresikan diri dan memengaruhi orang lain. Karena itu, jika manusia tidak berkomunikasi maka dia tidak dapat menciptakan dan memelihara relasi dengan sesama dalam kelompok, organisasi dan masyarakat; komunikasi memungkinkan manusia mengkoordinasikan semua kebutuhannya dengan dan sesama orang lain (2011:35)”

Adapun definisi komunikasi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah interaksi untuk menompang koneksi antarmanusia sehingga dapat menolong mereka memahami satu sama lain bagi pengakuan terhadap kepentingan bersama

(Zareksky, 1999). Dari dua definisi komunikasi menurut ahli komunikasi ini menyatakan pentingnya komunikasi dalam kehidupan dan relasi antara manusia.

Bagi kehidupan sebuah organisasi komunikasi sangat penting karena tanpa komunikasi organisasi tidak pernah ada atau mati. Dalam organisasi peran penting *Public Relation* disingkat (PR) sebagai alat manajemen modern, maka secara struktural merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi. Sejalan dengan konsep PR yang berkembang kini adalah konsep yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah, menurut Howard Childs (Ngurah, 1999:5), fungsi dasar PR bukan untuk menampilkan pandangan organisasi atau seni sikap publik, tetapi untuk melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian terhadap kepentingan publik setiap aspek pribadi organisasi maupun perilaku perusahaan yang punya signifikansi sosial. Jadi di sini PR berfungsi membantu organisasi melakukan penyesuaian terhadap lingkungan tempat organisasi tersebut beroperasi.

PR sebagai fungsi komunikasi, perlu dipahami bahwa kegiatan utama PR adalah melakukan komunikasi. PR sebagai fungsi staff khusus yang melayani para pemimpin organisasi, khususnya dalam membantu organisasi berkomunikasi dengan publik-publiknya. Onong (1998:36) mengemukakan bahwa fungsi PR meliputi hal-hal sebagai berikut: Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan dan melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum, dan membina hubungan secara harmonis antara organisasi dengan publik, baik internal maupun eksternal.

Badan Petanahan Nasional Republik Indonesia disingkat (BPN RI) merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang agraria atau pertanahan dan menangani hal-hal yang berurusan dengan sertifikat tanah. BPN RI meluncurkan Program LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah), adalah suatu Kantor Pertanahan

bergerak yang berbasis Teknologi Informasi, dalam bentuk mobil dan motor, merupakan layanan menjemput bola yang dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Tujuan program ini adalah untuk membantu masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanpa harus datang ke kantor pertanahan.

BPN Kabupaten Timor Tengah Utara (BPN Kabupaten TTU) telah menjalankan program LARASITA sejak tahun 2009. Awal Juni 2011 program LARASITA telah disosialisasikan di kelurahan Kefa Tengah. Dari data terlihat peningkatan sebelum dan sesudah program LARASITA. sebelum disosialisasikan di Kelurahan Kefa Tengah jumlah tanah yang tersertifikasi sebanyak 45 persen dari 19 hektar luas wilayah kemudian meningkat menjadi 70 persen. Mengingat tanah merupakan salah satu elemen yang sifatnya mendasar dan esensial, oleh karena itu tanah termasuk dalam kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh semua orang. Maka kepemilikan tanah akan diakui secara hukum diatas lembaran sertifikat tanah.

Public Relation memegang peranan penting dalam sebuah instansi. Menurut Dozier dan Broom, peranan Hubungan Masyarakat ada empat kategori antara lain : sebagai penasehat ahli (*expert prescriber*), fasilitator komunikasi (*communication fasilitator*), fasilitator proses pemecahan masalah (*problem solving process fasilitator*), dan teknisi komunikasi (*communication technician*). Peranan-peranan tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menilai keberhasilan program-program yang sedang dilakukan *Public Relation*. *Public Relation* dituntut untuk menciptakan kerjasama dengan dasar hubungan baik dengan publiknya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah pokok dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimanakah *Peranan Public Relation* dalam Program LARASITA BPN Kabupaten TTU di Kelurahan Kefa Tengah?”

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Peran Humas BPN Kabupaten TTU dalam program LARASITA di Kelurahan Kefa Tengah dan untuk mengetahui model perencanaan Humas BPN Kabupaten

TTU dalam pelaksanaan program LARASITA di Kelurahan Kefa Tengah.

Kajian empirik hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tirajoh dengan judul “Analisis Strategi Humas dalam Menyosialisasikan program Layanan Masyarakat untuk Sertifikat Tanah (Studi Deskriptif pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung)”. Peneliti membahas masalah mengenai analisis strategi *public relations* yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung dalam menyosialisasikan program LARASITA. Beragam konflik pertanahan yang muncul dan tanggapan apatis masyarakat menyebabkan BPN perlu mengupayakan program yang tepat untuk mendekati diri kepada masyarakat.

Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui strategi *public relations* yang dijalankan BPN, kendala yang muncul dan upaya dalam mengatasi kendala. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan melalui wawancara mendalam dengan narasumber internal BPN Kota Bandung dan BPN pusat RI serta narasumber eksternal yaitu Kepala Kelurahan dan para masyarakat lokal di Bandung. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati kegiatan sosialisasi program LARASITA langsung ke lapangan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya untuk mengetahui strategi PR yang dijalankan BPN Kota Bandung, kendala yang muncul dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut, sedangkan penelitian ini untuk mengetahui Peran PR BPN Kabupaten TTU dan model perencanaan yang digunakan dalam melaksanakan Program LARASITA.

Teori-teori yang dipakai untuk menganalisis Peran PR dalam Program Larasita BPN Kabupaten TTU di Kelurahan Kefa Tengah antara lain

Teori PR

Menurut C. Seidel, PR adalah :

“proses yang terus menerus dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh *goodwill* dan pengertian dari para pelanggannya, pegawai dan publik yang lebih luas ke dalam mengadakan analisis dan perbaikan terhadap diri sendiri,

sedangkan ke luar dengan mengadakan pernyataan-pertanyaan” (Soemirat, 2008:12)

Rex Harlow juga berpendapat :

Public relations adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama melibatkan manajemen dalam menghadapi permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini publik; mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif; bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama (Ruslan,2005:16)

Fungsi *Public Relation* menurut Cutlip, Center & Broom dalam bukunya, *Effective Public Relations* (2002:10) adalah: memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili *public* suatu organisasi, sehingga kebijakan serta operasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan pandangan publik tersebut; memberi nasehat pada unsur manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima dan disetujui oleh publik; merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat menimbulkan kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi.

Sementara Edwars L Bernays dalam bukunya *Public relations*, yang dikutip oleh Ruslan (2003:19) menjelaskan bahwa hubungan masyarakat (humas) mempunyai tiga fungsi, yaitu: memberikan penerangan kepada masyarakat; melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung dan berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.

Suatu program Humas baik berjangka panjang atau pendek harus direncanakan dengan baik sehingga mencapai tujuan yang

memuaskan. Salah satu model perencanaan humas adalah apa yang disebut sebagai model enam langkah yaitu sebagai berikut : (Anggoro, 2005:76-97) : Pengenalan situasi; Penetapan tujuan; Definisi khalayak; Pemilihan media dan teknik-teknik Humas; Pengaturan/ perencanaan anggaran; Pengukuran hasil kegiatan

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dipandang sebagai bentuk kritik kepada positivisme dan para ahli menyebutkan sebagai postpositivisme. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa hanya penelitian kuantitatif yang pemikirannya didasari oleh empirisme, idealisme, kritisme dan rasionalisme. (Bugin, 2007:4)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Nazir (2003:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari studi deskriptif adalah mempelajari aspek siapa, apa bilamana, dan bagaimana dari suatu topik. (Spillane, 2008:98)

Penelitian ini dilaksanakan di BPN Kabupaten TTU Basuki Rahmat – Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive*, yaitu pengambilan informan dengan pertimbangan-pertimbangan (Sugiyono. 2005: 112). Peneliti memilih informan internal karena informan tersebut yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program LARASITA BPN kabupaten TTU.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah informan internal adalah: Kepala Kantor BPN Kabupaten TTU, Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten TTU dan Petugas Lapangan yang Menangani Program Larasita BPN Kabupaten TTU

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode : *Field research* (penelitian lapangan), yaitu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data primer dengan cara : Melakukan observasi terlibat dan melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan

informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti; *Studi* dokumen, yaitu mengkaji dokumen-dokumen pada BPN Kabupaten TTU, yang berhubungan dengan topik penelitian seperti laporan tahunan dan laporan pelaksanaan Program LARASITA.

Analisis data merupakan hal yang perlu dilakukan untuk menguji kevaliditasan sebuah data. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Iskandar (2008:222) menambahkan bahwa analisis data model Miles dan Huberman dilakukan dalam empat (4) langkah yaitu : Reduksi data, Kategorisasi data, Penyajian data dan pengambilan kesimpulan (serong disebut tahap verifikasi).

Hasil Penelitian

Peran PR BPN Kabupaten TTU dalam program LARASITA di Kelurahan Kefa Tengah

Menurut Dozier dan Broom peran PR yaitu sebagai penasihat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecah masalah, dan teknisi komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber yang memiliki hubungan terhadap objek penelitian, hasil penelitian peran PR BPN Kabupaten TTU dalam program LARASITA di kelurahan Kefa Tengah adalah sebagai berikut :

Peran Humas BPN Kabupaten TTU sebagai Penasihat Ahli

Peran BPN Kabupaten TTU sebagai penasihat ahli dalam program LARASITA di Kelurahan Kefa Tengah yaitu BPN mempunyai kewenangan penuh dan ahli dalam pengurusan pertanahan. BPN Kabupaten TTU dalam kinerjanya juga sebagai penasihat ahli atau sebagai ahli dan wewenang di bidang pertanahan, maka BPN Kabupaten TTU membantu masyarakat untuk memberikan solusi dalam masalah pertanahan. Menurut Bapak Arnold Taimenas :

“Misalnya masyarakat yang belum mengerti persyaratan dalam pengurusan sertifikat, maka disini BPN membantu masyarakat menjelaskan bagaimana prosedur pengurusan sertifikat.”

disimpulkan peran BPN Kabupaten TTU dalam program LARASITA adalah sebuah

lembaga pemerintahan tingkat kabupaten yang dimana semua keputusan ditetapkan oleh Kepala BPN RI, dan kemudian dijalankan di BPN Provinsi, BPN Kota dan BPN Kabupaten yang menjalankan Program LARASITA yang bersifat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.

Program LARASITA telah diatur sesuai Peraturan Kepala BPN RI Nomor: 18 Tahun 2009. Dalam penerapannya peran BPN Kabupaten TTU sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dozier (Ruslan, 2005:20) bahwa peran sebagai penasihat ahli ialah seorang praktisi yang memiliki kemampuan tinggi untuk mencari solusi penyelesaian masalah dengan publiknya. Teori ini didukung pula dengan teori yang dikemukakan oleh Cutlip (2006:46) bahwa ketika praktisi PR mengambil peran sebagai penasihat ahli, orang lain akan menganggap mereka sebagai otoritas dalam persoalan.

Berikut hasil wawancara dengan staf lapangan Bapak Marcel Kaful yang memperkuat penjelasan sebelumnya :

“ketika kami turun dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, masyarakat sangat antusias sekali mendengar pengarahannya dari petugas, hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan yang diberikan masyarakat kepada kami dan kami menjelaskan dengan seksama pertanyaan dari mereka” (wawancara dilakukan tanggal 10 september 2012)

Peran BPN Kabupaten TTU sebagai penasihat ahli juga didukung oleh teori kredibilitas komunikator menurut Hovland dan Weiss (Hamidi, 2007:71) bahwa *Expertise* (keahlian) dapat diartikan sebagai kemahiran suatu ilmu dan bidang pekerjaan. Setiap individu harus memiliki modal dasar dalam menjalani pekerjaannya berupa ilmu, informasi, kemampuan kerja, penguasaan terhadap bidangnya sehingga dia dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dianggap cakap oleh atasan dan masyarakat. Anggapan tersebut merupakan ukuran suatu klien.

Dapat dipercaya diartikan sebagai rasa percaya yang diberikan orang lain yang timbul dari adanya keahlian, ketekunan, kejujuran, loyalitas dan kapasitas yang tinggi dari individu dalam bekerja sebagai atasan atau

lingkungan tempat bekerja meyakini bahwa individu tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diterapkan atau diinginkan. Kepercayaan yang diimplementasikan oleh BPN Kabupaten TTU dalam mensosialisasikan program LARASITA di Kelurahan Kefa Tengah agar masyarakat dapat melegalisasi aset tanah mereka, dan masyarakat dapat memperoleh Informasi mengenai pertanahan.

Peran PR BPN Kabupaten TTU sebagai Fasilitator Komunikasi

Peran BPN Kabupaten TTU sebagai fasilitator komunikasi dinyatakan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten TTU, Bapak Drs. Martono, M.Si :

“Dengan meningkatnya volume sengketa, masyarakat semakin sandar pentingnya tanah itu. Tanah itu merupakan penyumbang status sosial bagi seseorang, atau dikatakan tuan tanah. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai tanah, maka dari itu sengketa tanah yang semakin meningkat, satu meter tanah di geser dapat menimbulkan konflik, disinilah BPN TTU membantu masyarakat dalam memediasi permasalahan tersebut”

Sehubungan dengan Peraturan peraturan Kepala BPN RI Nomor : 18 Tahun 2009 tentang LARASITA BPN RI, bahwa larasita menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kantor pertanahan, salah satunya LARASITA melakukan jenis kegiatan yaitu diantara lain, memfasilitasi dan mendekatkan akses-akses untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi masalah, sengketa atau perkara pertanahan secara dini, serta memfasilitasi upaya penanganannya. Ketentuan umum dari peraturan Kepala BPN RI Nomor : 18 Tahun 2009 tentang LARASITA ini dilaksanakan di BPN kabupaten TTU.

Keterangan nara sumber dan data dari tempat penelitian dapat dikatakan bahwa peran BPN Kabupaten TTU dalam program LARASITA di Kelurahan Kefa Tengah yang

diimplementasikan oleh BPN Kabupaten TTU sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dozier (Ruslan, 2005:20) bahwa peran PR sebagai fasilitator komunikasi adalah bagaimana seorang praktisi humas mampu bertindak sebagai komunikator yang membantu pihak manajemen dalam mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Peran ini maka BPN Kabupaten TTU dapat menjalin komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan sehingga hubungan yang lebih erat dapat terjalin antara BPN dengan masyarakat.

Model Perencanaan PR BPN Kabupaten TTU dalam Program LARASITA di Kelurahan Kefa Tengah

Pengenalan Situasi

Menurut Anggoro kunci awal membentuk suatu perencanaan yang logis adalah pemahaman terhadap situasi yang ada.

1. Posisi Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan satu-satunya lembaga pemerintah non departemen yang memiliki wewenang dalam membuat dan melegalisasi asset pertanahan masyarakat. Sesuai peraturan perundang-undangan Kepala BPN RI Nomor : 18 Tahun 2009 tentang LARASITA BPN RI, Bab I pendahuluan berisi :

LARASITA menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada pada kantor pertanahan. Namun sesuai dengan sifat yang bergerak, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan pemberian atau pendelegasian kewenangan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan di lapangan.

2. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya legalisasi asset pertanahan

Masyarakat kelurahan Kefa Tengah sadar untuk melegalisasi aset tanah mereka. Hal ini dikatakan oleh bapak Martono, menurutnya :

“masyarakat semakin hari tingkat kesadaran untuk melegalisasi tanah mereka itu semakin tinggi, hal ini dibuktikan dengan volume sengketa yang semakin tinggi dan jumlah pendaftaran sertifikat yang semakin meningkat”

Dengan adanya program LARASITA yang dilaksanakan di kelurahan kefa tengah, antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan tanah mereka semakin tinggi. Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah kabupaten TTU Bapak Arnolus Taimenas Mengatakan

“antusiasme masyarakat kelurahan kefa tengah sangat tinggi, bahkan kegiatan LARASITA di laksanakan sampai dua kali di kelurahan kefa tengah. Hal tersebut dilakukan karena permintaan masyarakat yang ingin melegalisasi tanah mereka terus meningkat”

Penetapan Tujuan

Pelaksanaan program LARASITA memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh terutama masyarakat perdesaan. BPN berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan agar lebih berkualitas, cepat, akurat, tepat, transparan dan akuntabel dengan tetap menjaga kepastian hukum. sesuai dengan pernyataan bapak Drs. Martono, M.Si bahwa :

“tujuan dari program LARASITA yaitu mendekati diri dengan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya melegalisasi tanah, meminimalisir maraknya penggunaan calo dalam pengurusan sertifikat tanah dan membantu mensejahterahkan rakyat dengan disertifikasinya tanah mereka, sehingga mereka bisa menggunakannya sebagai jaminan untuk modal usaha.”

Definisi Khalayak

Menurut Anggoro (2002:81) suatu organisasi tidak mungkin menjangkau seluruh masyarakat, karena itu pemilihan dan pembatasan khalayak diperlukan agar organisasi tersebut mudah untuk mengikutsertakan mereka dalam kegiatan humas. Teori angoro berbeda dengan realisasi kegiatan penyosialisasian program LARASITA. Khalayak yang menjadi target dalam sosialisasi program LARASITA ditujukan kepada masyarakat luas. Tidak terdapat pengelompokan atau segmentasi yang terdiri tingkat sosial maupun pendidikan.

Sesuai dengan kutipan hasil wawancara dengan bapak Martono, beliau menjelaskan “dalam sosialisasi program LARASITA, tidak ada pengelompokan, semua masyarakat menjadi target utama, jadi BPN ingin semua masyarakat yang memiliki tanah atau tidak tanpa kecuali semua masyarakat dapat mengerti dan tahu pentingnya melegalisasi tanah”

Pemilihan Media dan Teknik-teknik humas

Menurut Anggoro (2002:81) dalam dunia kehumasan ada media khusus seperti jurnal internal, buletin atau majalah dinding yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada publik eksternal mengenai program humas.

Dijelaskan oleh bapak Arnold Taimenas, menurutnya :

“selama ini program LARASITA baru berbentuk sosialisasi saja, dalam perencanaan kedepan media yang akan digunakan adalah media pameran yang biasa dilaksanakan setiap peringatan 17 Agustus”

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran mengandung arti penting karena kita dapat mengetahui besarnya dana yang diperlukan untuk memperoleh tujuan dari kegiatan humas. disampaikan oleh Bapak Arnold Taimenas “anggaran untuk program LARASITA diadakan setiap periode anggaran.”

Pengukuran Hasil Kegiatan

Menurut Anggoro (2002:96) :

“pengukuran hasil berkenaan dengan teknik-teknik yang digunakan untuk mengenali situasi seringkali juga dimanfaatkan guna mengevaluasi berbagai hasil yang telah dicapai dari segenap kegiatan humas yang telah dilaksanakan.”

Menurut bapak Martono :

“keberhasilan program LARASITA diukur dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melegalisasi tanah mereka. Tingkat kepuasan masyarakat dan animo masyarakat untuk melegalisasi tanah semakin hari semakin tinggi, melalui LARASITA BPN

mensosialisasikan pentingnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan sebagai sumber ekonomi. Dengan sertifikat masyarakat dapat berhubungan dengan Bank atau lembaga yang memberikan pinjaman sehingga mereka dapat menggunakan sebagai modal usaha.”

Peningkatan volume permohonan sertifikasi dari masyarakat menjadi indikator bahwa masyarakat telah menangkap arti pentingnya sertifikat atas tanah sebagai bukti kepemilikan dan sumber permodalan.

Pembahasan

Peran Humas BPN Kabupaten TTU dalam layanan Program LARASITA di Kelurahan Kefa tengah dikaitkan dengan empat teori Cutlip, Center & Broom

Peran PR BPN Kabupaten TTU sebagai penasehat ahli

PR dipercaya oleh pemimpin organisasi sebagai pakar atau orang yang berkompeten dibidang ini. Praktisi PR dianggap memiliki otoritas dalam persoalan dan solusinya. Pemimpin manajemen atau organisasi menyerahkan tanggung jawab atas program Larasita ke tangan praktisi PR untuk mendefinisikan Problem, mengembangkan program, dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan program Larasita di lapangan.

Para pelaku peran ini menempatkan dirinya sebagai sumber informasi dan sebagai kontak antara organisasi dan publiknya. Sebagai wasit dari interaksi, memantapkan agenda yang akan didiskusikan antara dua belah pihak, menyimpulkan pandangan, bereaksi terhadap kasus, membantu partisipan mendiagnosa masalah, membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan komunikasi.

Peran PR BPN Kabupaten TTU sebagai fasilitator pemecahan masalah

Mereka berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Bergabung dengan konsultan mulai dari awal direncanakan program hingga evaluasinya. Membantu manajemen menerapkan PR sebagai tahapan fungsi

manajemen yang sama dengan kegiatan manajemen yang lain.

Melalui peran ini mereka menjadi paham spirit setiap program baik motivasi maupun tujuan mengapa program harus dilaksanakan, mereka mensupport perubahan strategis organisasi, keputusan yang sifatnya taktis dan memiliki komitmen pada perubahan dan mampu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan program.

Peran PR BPN Kabupaten TTU sebagai teknisi komunikasi

PR diarahkan untuk berperan menulis, menulis *news letter*, menulis *in house journal*, menulis *news release*, menulis fitur dan sebagainya. Biasanya praktisi dalam peran ini tidak hadir pada saat manajemen menemui kesulitan. Mereka tidak dilibatkan dalam manajemen sebagai pengambil keputusan. Peran mereka lebih ke arah penulisan tools dan mengimplementasikan program.

Model perencanaan PR BPN Kabupaten TTU dalam layanan program LARASITA di kelurahan kefa tengah

Model perencanaan PR BPN Kabupaten TTU dalam layanan program LARASITA di kelurahan kefa tengah jika dikaitkan dengan enam model perencanaan humas oleh Anggoro yaitu :

1. Pengenalan Situasi

Suatu organisasi terdapat struktur Humas untuk menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya. Cutlip, Center dan Broom merumuskan dua fungsi PR (Prayudi, 2007:4) yaitu untuk mengidentifikasi opini, persepsi, dan tanggapan publik terhadap organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya dan untuk melayani keinginan publik organisasi dan memberikan saran kepada pihak manajemen demi tercapainya tujuan dan manfaat bersama. Seperti BPN menilai pandangan masyarakat mengenai pelayanan publik yang dijalankan organisasinya perlu menjadi perhatian bagi kalangan internal dalam menentukan pendekatan yang akan dilakukan melalui sosialisasi program LARASITA.

Struktur Humas dalam BPN Pusat (Jakarta) dijalankan oleh bidang hukum dan Hubungan Masyarakat. Sedangkan BPN kabupaten TTU dalam menjalankan Program LARASITA fungsi PR dijalankan oleh Kepala kantor yang kemudian menunjuk Seksi Hak Pendaftaran Tanah sebagai penanggung jawab dalam sosialisasi program LARASITA.

Sebelum melakukan sosialisasi, seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten TTU terlebih dahulu menyusun model perencanaan yang tepat agar dalam melakukan sosialisasi di kelurahan kefa tengah.

2. Penetapan Tujuan

James Gruning mengatakan lima objektif dimana tiga diantaranya merupakan tujuan komunikasi dari sosialisasi yang dilakukan BPN yaitu *acceptance of the message* (penerimaan pesan), *attitude change* (perubahan sikap), *change in overt behavior* (perubahan perilaku terbuka).

Acceptance of the message (penerimaan pesan), berdasarkan pandangannya tentang realitas, target publik tidak hanya mempertahankan pesan tetapi menerimanya secara valid. Target pesan dapat memahami dengan baik inti pesan yang terkandung dalam sosialisasi LARASITA, yaitu pentingnya legalisasi asset pertanahan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.

Attitude change (perubahan sikap), target publik tidak hanya mempercayai isi pesan tetapi membuat komitmen verbal atau mental untuk perubahan perilaku dari hasil pesan. Target publik diharapkan mampu mengubah perilaku sesuai isi pesan. Proses komunikasi yang dilakukan BPN dapat mempengaruhi target publik dalam berperilaku. Masyarakat yang sebelumnya ragu untuk mengurus sertifikat tanah karena prosedur yang berbelit dapat diyakinkan kembali untuk melegalisasi asset pertanahan melalui program LARASITA dan tidak lagi memanfaatkan jasa calo untuk mempermudah pengurusan sertifikat.

Change in overt behavior (perubahan perilaku terbuka), anggota publik dapat merubah perilakunya dengan melakukan tindakan membeli dan menggunakan produk atau jasa dalam pesan. Unsur ini dapat terlihat dari masyarakat yang turut mengikuti program LARASITA untuk mendapatkan sertifikat tanah yang belum legal.

3. Definisi khalayak

Khalayak adalah kelompok orang atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal (Anggoro, 2001:18). Istilah khalayak disebut juga sebagai publik. Setiap organisasi memiliki publiknya masing-masing. Publik dikelompokkan menjadi publik eksternal dan publik internal. Publik internal adalah para pegawai BPN dan publik eksternal adalah masyarakat lokal maupun opinion maker seperti LSM, akademisi dan lainnya. Pemahaman dan sosialisasi internal harus dilakukan dalam mengembangkan keselarasan antara pemahaman internal dengan komunikasi eksternal LARASITA.

Menurut James Grunig (Gregory, 2004:88) salah satu tipe publik yaitu publik yang sadar (*aware publics*) yakni kelompok yang mengenali adanya masalah. BPN melakukan upaya sosialisasi hingga pada akhirnya mampu membentuk suatu kelompok publik yang sadar akan pentingnya legalisasi asset pertanahan.

4. Pemilihan media dan teknik-teknik humas

BPN Kabupaten TTU harus melalui tahapan pemilihan media dan teknik-teknik humas, dimana BPN melakukan tiga konteks komunikasi (Mulyana, 2007:72) yang dimaksud terdiri dari komunikasi kelompok (*group communication*), komunikasi publik (*public communication*), dan komunikasi massa (*mass communication*).

Komunikasi kelompok (*group communication*) adalah komunikasi yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.

BPN kabupaten TTU menyelenggarakan penyuluhan langsung yang biasanya berlangsung saat pelaksanaan program LARASITA.

Komunikasi publik (*public communication*) adalah komunikasi antar seorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau khalayak yang tidak bisa dikenal satu persatu. Komunikasi publik berlangsung lebih normal dan lebih sulit daripada komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok karena komunikasi publik menuntut persiapan yang cermat, keberanian dan kemampuan menghadapi sejumlah besar orang. Contohnya adalah pidato yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Agraria ke 50. Pada pidato beliau mengajak seluruh kalangan warga Negara Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam menyukseskan program LARASITA dan BPN sebagai penyelenggara program harus konsisten dalam meningkatkan pelayanan publik.

Komunikasi media massa (*mass communication*) adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi) yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditunjukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. BPN kabupaten TTU belum menggunakan media masa untuk membantu mensosialisasikan program LARASITA, karena program ini baru dijalankan dua tahun terakhir. Namun harapan kedepannya, media massa akan dipergunakan sebagai media komunikasi, agar program ini dapat berjalan lebih efektif.

5. Perencanaan anggaran

Pada prakteknya, BPN kabupaten TTU dalam menjalankan program LARASITA, dalam merencanakan anggaran dengan cara mengajukan ke kantor BPN Pusat di Jakarta.

6. Pengukuran hasil

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melegalisasi asset tanahnya, menunjukan BPN Kabupaten TTU berhasil mencapai salah satu fungsi

komunikasi yang diungkapkan Mulyana (2007:33), “komunikasi yang berfungsi untuk memberitahukan atau menerangkan (*to inform*) mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai fakta atau informasi yang disampaikan akurat dan layak diketahui.”

Kesimpulan

Peran PR BPN Kabupaten TTU dalam Program LARASITA di Kelurahan Kefa Tengah

Dari keempat peran PR Cutlip, Center & Broom, BPN Kabupaten TTU hanya menjalankan dua peran yaitu sebagai penasihat ahli yaitu BPN mempunyai kewenangan penuh dalam pengurusan pertanahan, BPN membantu masyarakat untuk memberikan solusi dalam permasalahan pertanahan, dan kedua berperan sebagai fasilitator komunikasi atau mediator untuk membantu mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat dan membantu memediasi permasalahan yang dialami masyarakat.

Model perencanaan Humas BPN kabupaten TTU dalam program LARASITA di kelurahan Kefa Tengah

Enam model perencanaan humas yang diterapkan BPN Kabupaten TTU dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu :

Langkah pertama melalui pengenalan situasi tentang posisi BPN, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya legalisasi asset pertanahan; langkah kedua yakni penetapan tujuan diantaranya mendekatkan BPN dengan masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya melegalisasi asset tanah, dan meminimalisir maraknya jasa calo dan membantu mensejahterakan masyarakat: langkah ketiga adalah penentuan khalayak, sasaran sosialisasi yang luas, sehingga tidak ada segmentasi secara spesifik; langkah keempat adalah pemilihan media atau teknik-teknik humas yang digunakan BPN adalah penyuluhan langsung di lapangan (sosialisasi); langkah kelima adalah perencanaan anggaran, dalam sosialisasi program LARASITA telah dianggarkan setiap tahunnya; langkah yang terakhir adalah pengukuran hasil yang

membahas pengukuran hasil, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN kabupaten TTU berhasil menjalankan program LARASITA dikelurahan kefa tengah, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melegalisasi tanah mereka sehingga program LARASITA dilaksanakan sebanyak dua kali di kelurahan ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Afifudin. H et al.2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Burgin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Badudu J dan Sutan Moh Zain. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan
- Cangara, Hafid.2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Cutlip, Center.2000. *Effective Public Relations*. Bandung:Kecana Permada Media Group
- Dwiyanto, Agus.2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaboratif*. Gajah Mada University Wordpress.
- Effendy, Onong Uchjana.2000. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- _____. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____. 2004. *Human Relations & Public Relations*. Jakarta:Mandar Maju
- Hasan, Erliana. *Komunikasi Pemerintahan*. PT Refika Aditama. 2005
- Imam, Indra el al.2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Iriantara, Yosol. 2003.*Managemen Strategi PR*. Bandung:GHALIA INDONESIA
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Liliweri, Allo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta, Kencana
- Moore, Frazier. H.2005. *Humas Membangun Citra dengan Komunikasi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

- Morrison. 2008. *Manajemen Public Relations : Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mulyana, Deddy. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia
- Oemi, Abdurahman. 1995. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Perangin Angin, Loina. 2001. *Membina Hubungan Baik dengan Publik*. Bandung: CV. Palolo
- Rita, F. Silia et al. 2009. *Panduan Praktisi Public Relations*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Rurmanti, Maria Asumta. 2002. *Dasar-Dasar Public Relations Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiarsana Indonesia
- Ruslan, Rosadi. 2003. *Metode Penelitian Public Relations & Komunikasi*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____. 2003. *Kiat & Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka
- _____. 2005. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi Ed. Rev.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Simanjutak, P.J. 2005. *Manajemen & Evaluasi Kerja*, Jakarta : Lembaga Penelitian FE UI
- Soemirat, Soleh et al. 2008. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Soekarno, Sahab. 1997. *Teknik Manajemen Kerja*, Jakarta : Bima Sumber Daya Manusia.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu komunikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiarsana Indonesia
- Wilcox, Dennis L., et al. 2005. *Public Relations Strategies and Tactics Seventh Edition*. Pearson Education
- Wright. 1999. *How To Pass Public Relations*. Jakarta: Salemba Humanika.

Website

<http://www.bpn.go.id/Beranda/Berita---Artikel/Artikel/LARASITA,-MENJANGKAU-YANG-TIDAK-TERJANGKAU.aspx>